

# DAMPAK PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA RAKYAT TERHADAP KEMISKINAN DAN PEREKONOMIAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

## *Impacts of Community's Coconut Farm Development on Poverty and Regional Economy of Indragiri Hilir Regency*

**Ahmad Aris, Bambang Juanda, Akhmad Fauzi, dan Dedi Budiman Hakim**

*Program Studi PWD, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Kampus Darmaga Bogor*

### ABSTRACT

Indragiri Hilir Regency is one of the coconut production centers in Indonesia and is considered as the main source of income for most of the farmers. However, this Regency has a high percentage of poverty during the past few years in Riau Province. This research aims to analyze the impact of coconut sector development on regional economy, identify the potential of regional losses, and formulate policy options to improve of regional income and to decrease poverty level. Primary and secondary data were analyzed using Social Accounting Matrix, Foster-Greer Thorbecke Poverty Index and descriptive analysis. The result indicates that coconut and its processing activities have high impact on structure of output, gross added value, and employment opportunity. Coconut sector has indicated regional losses, especially at the large-scale processing activity caused by the flow of both employment and capital incomes to other regions. Investment policies amounted to Rp. 50 billion each in coconut sector (Simulation 1), large-scale coconut industry sector (Simulation 2), and household scale industry sector (Simulation 3) could only reduce poverty level at 2.78 percent (for farm household landholding size ranges from 0.00 to 1.00 ha), and 5.67 percent (for landholding size more than 1.00 ha). Other household groups have no change in poverty level. Simulation 1 provides higher contribution in improving incomes of production factors and household, respectively at 2.07 and 2.08 percent compared with Simulation 2 and 3. Meanwhile, Simulation 3 contributes the highest impact in increasing income of production sector (about 2.79 percent).

**Key words:** *smallholders coconut, poverty, regional loss, regional growth, income*

### ABSTRAK

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu sentra produksi kelapa di Indonesia dan sebagian besar penduduknya berusaha di sektor kelapa sebagai mata pencaharian utamanya. Disisi lain, kabupaten ini memiliki persentase penduduk miskin yang tertinggi diantara kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau pada beberapa tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengembangan sektor kelapa terhadap perekonomian wilayah, menganalisis indikasi dan potensi kebocoran wilayah sektor kelapa serta dampaknya terhadap perekonomian wilayah, dan menganalisis opsi kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan dan menurunkan kemiskinan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang dianalisis dengan menggunakan

Sistem Neraca Sosial Ekonomi, Indeks kemiskinan *Foster-Greer-Thorbecke*, dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor kelapa dan sektor industri pengolahan kelapa memiliki dampak yang besar terhadap pembentukan output, nilai tambah bruto, dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Indragiri Hilir. Sektor kelapa mengalami kebocoran wilayah, terutama pada sektor industri pengolahan kelapa skala besar yang disebabkan oleh adanya aliran pendapatan modal dan tenaga kerja yang keluar wilayah. Kebijakan investasi pada sektor kelapa (simulasi 1), sektor industri kelapa skala besar (simulasi 2), dan sektor industri kelapa skala rumah tangga (simulasi 3) masing-masing 50 milyar rupiah hanya mampu menurunkan kemiskinan sebesar 2,8 persen untuk rumah tangga petani yang memiliki lahan 0,00-1,00 ha, dan 5,67 persen untuk rumah tangga petani yang memiliki lahan > 100 ha. Disisi lain, pada kelompok rumah tangga lainnya tidak mengalami penurunan kemiskinan. Simulasi 1 memberikan kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan pendapatan faktor produksi dan pendapatan rumah tangga, yaitu 2,07 persen dan 2,08 persen dibandingkan simulasi 2 dan 3. Sedangkan simulasi 3 memiliki dampak yang tertinggi dalam meningkatkan pendapatan pada sektor produksi yaitu sebesar 2,79 persen.

**Kata kunci :** *petani kelapa, kemiskinan, kebocoran wilayah, pertumbuhan wilayah, pendapatan*

## PENDAHULUAN

Dalam pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terlihat bahwa peran sektor pertanian masih merupakan sektor dominan terhadap pembentukan PDRB, yaitu sebesar 44,86 persen (BPS, 2007). Komoditas unggulan dominan yang dikembangkan di daerah adalah kelapa dengan luas areal mencapai 461.310 hektar. Komoditas tersebut telah menempatkan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai kabupaten penghasil kelapa terbesar di Indonesia.

Perkebunan kelapa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir secara umum merupakan perkebunan kelapa rakyat seluas 387.552 hektar dengan produksi sebanyak 395.006 ton kopra/tahun dan melibatkan sebanyak 120.188 kepala keluarga petani. Sedangkan perkebunan kelapa skala perusahaan yang merupakan perkebunan swasta nasional (PT Pulau Sambu Group) seluas 73.758 hektar dengan produksi 124.805 ton kopra/tahun (Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir, 2007).

Komoditas kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir masih dapat dikembangkan mengingat lahan yang tersedia untuk pengembangan masih cukup luas yaitu mencapai 210.283 hektar (Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir, 2007). Secara umum sektor kelapa merupakan mata pencaharian utama masyarakat daerah ini. Semangat dan partisipasi masyarakat cukup tinggi, dan merupakan sumber penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan yang cukup menonjol.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu mencapai 7,29 persen pertahun selama kurun waktu tahun 2000 sampai tahun 2005. Kondisi ini menempatkan Kabupaten Indragiri Hilir pada peringkat kedua tertinggi setelah Kota Pekanbaru. Namun disisi lain, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin paling tinggi diantara kabupaten yang ada di Provinsi Riau yaitu mencapai 197.414 jiwa atau setara dengan 31,45 persen dari jumlah penduduk total Kabupaten Indragiri Hilir (Balitbang Provinsi Riau, 2006).

Pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) telah menjadi komitmen dan kesepakatan bagi semua pihak. Pengentasan kemiskinan memiliki tantangan yang sangat besar untuk dicapai, karena permasalahan dan fenomena kemiskinan memiliki sifat dan karakteristik yang sangat beragam. Kemiskinan bukan hanya terkait dengan aspek ekonomi, akan tetapi juga terkait dengan aspek sosial, budaya, politik dan dimensi wilayah (*spatial*), serta rentan terhadap eksternalitas (RPJM 2004-2009 dan Smeru, 2008). Sebab-sebab kemiskinan tidak berasal dari gejala sesaat, tetapi merupakan masalah struktural yang disebutnya "kerentanan ekonomi" (*economic insecurity*), yang dipengaruhi oleh risiko-risiko sosial ekonomi dan ketidakpastian serta kemampuan yang terbatas untuk mengatasi dan memulihkan diri (Standing, 2006; Dasgupta 1997; dan Barrett dan McPeak 2005)

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah di atas maka dapat dirumuskan batasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: (1) bagaimana peran sektor kelapa terhadap perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir ditinjau dari aspek output, PDRB dan tenaga kerja serta posisi keterkaitan sektor kelapa dan *multiplier effect* terhadap output, nilai tambah bruto, pendapatan, dan tenaga kerja; (2) bagaimana indikasi dan potensi kebocoran wilayah sektor kelapa serta dampaknya terhadap perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir; dan (3) opsi kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi angka kemiskinan.

## KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam suatu wilayah terdapat beberapa sektor perekonomian. Sektor perekonomian yang dominan memberikan nilai tambah dan penyerapan lapangan kerja serta memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor lainnya merupakan ciri dari suatu sektor atau komoditas unggulan. Oleh karena itu, sektor atau komoditas unggulan tersebut perlu mendapat perhatian dalam rangka menciptakan nilai tambah yang sebesar-besarnya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan perekonomian wilayah.

Nilai tambah komoditas unggulan daerah dipengaruhi oleh kinerja sistem produksi, dimana keterkaitan subsistem-subsistem mulai dari hilir hingga hulu serta faktor pendukung, perlu dikelola secara utuh dan terintegrasi guna

meningkatkan nilai tambah komoditas. Jika sistem produksi komoditas tidak diikuti oleh sektor prosesing atau sektor turunan, maka dampaknya akan mempengaruhi kecilnya nilai tambah yang dihasilkan. Dengan demikian pengembangan sektor turunan secara ekonomi, berarti dapat mempengaruhi pendapatan faktor produksi (modal dan tenaga kerja), pendapatan institusi (kelompok rumah tangga), dan pendapatan wilayah.

Demikian juga ketika pendapatan dan nilai tambah dari sistem produksi kurang menguntungkan maka selain dapat berdampak pada perekonomian wilayah juga dapat berdampak pada rendahnya pendapatan faktor produksi dan institusi serta pendapatan sektor produksi. Kondisi ini akan mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan sektor pertanian. Dengan kata lain, rendahnya nilai tambah yang diperoleh dari kegiatan sistem produksi pertanian, maka dapat mengganggu produktivitas dan pemanfaatan lahan, dan pada gilirannya dapat mendorong terjadinya peningkatan eksternalitas negatif terhadap pemanfaatan lahan pertanian, seperti terjadinya konversi lahan, turunnya produktivitas lahan, yang akhirnya tentu dapat mengganggu keberlanjutan sumberdaya alam pertanian dan sistem produksi pertanian itu sendiri.

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peranan nilai tambah dan pendapatan merupakan inti dari proses pertumbuhan ekonomi (Bendavid, 1991). Dimana nilai tambah dan pendapatan mempengaruhi pendapatan masyarakat dan perekonomian wilayah. Untuk meningkatkan nilai tambah maka diperlukan pengembangan rantai industri pengolahan, sehingga output yang dipasarkan dalam suatu wilayah merupakan suatu produk akhir, bukan bahan mentah/bahan baku. Peningkatan nilai tambah akan dapat meningkatkan *multiplier* yang dihasilkan dari pembangunan ekonomi suatu wilayah.

Bendavid (1991) menjelaskan bahwa terjadinya kebocoran wilayah akan memberikan dampak pada kecilnya *multiplier* yang dihasilkan dari pembangunan ekonomi di suatu wilayah, atau dengan kata lain makin besar kebocoran yang terjadi, maka makin besar pula *multiplier* pendapatan yang hilang bagi suatu wilayah. Selanjutnya Rada dan Taylor (2006) menjelaskan bahwa kebocoran dapat dilihat dari sisi agregat *demand* seperti ketika peningkatan investasi, ekspor, dan belanja pemerintah menghasilkan *multiplier* pendapatan yang kecil bagi suatu daerah. Selanjutnya Christopher dan Bryan (1994) menjelaskan kebocoran dapat terjadi ketika bagian dari pendapatan yang dibelanjakan oleh rumah tangga untuk konsumsi (*consumption*) barang-barang dan jasa-jasa dominan mengkonsumsi yang bukan diproduksi di dalam suatu wilayah atau dominan impor dari wilayah lain.

Dari beberapa konsep kebocoran wilayah dapat diartikan bahwa selain dari sisi pengeluaran, kebocoran wilayah juga dapat dilihat dari sisi penerimaan. Adanya sumber penerimaan wilayah dalam bentuk nilai tambah yang tidak dapat dimanfaatkan guna meningkatkan pendapatan domestik maka kondisi tersebut merupakan indikasi kebocoran wilayah. Hal ini sesuai dengan Anwar (2004) yang menjelaskan bahwa kebocoran wilayah dapat terjadi apabila nilai

tambah ekonomi suatu wilayah mengalir ke wilayah lain, karena tidak dapat dimanfaatkan atau ditangkap secara optimal oleh suatu wilayah. Dengan demikian, berarti kebocoran wilayah dapat merugikan perekonomian wilayah serta dapat mengganggu keberlanjutan pembangunan (Rustiadi *et al.* 2005).

Karena kinerja sistem produksi mempengaruhi nilai tambah dan pendapatan, selanjutnya pendapatan mempengaruhi perekonomian wilayah. Dengan demikian, terjadinya kebocoran nilai tambah tentu dapat mempengaruhi perekonomian wilayah, dan pada gilirannya tentu dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi wilayah.

Adanya keterkaitan sistem produksi komoditas unggulan daerah dengan kebocoran wilayah serta dampaknya terhadap perekonomian wilayah dan perekonomian masyarakat, sehingga kajian kebocoran wilayah dalam sistem produksi komoditas unggulan daerah serta dampaknya terhadap perekonomian wilayah dan masyarakat dalam upaya pengembangan ekonomi wilayah dan pencapaian tujuan pembangunan wilayah menarik untuk dilakukan.

## METODE PENELITIAN

### Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau pada Bulan November 2009 sampai Februari 2010.

### Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data dan sumber data dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data dan Sumber Data yang Digunakan dalam Penelitian

Tujuan	Jenis Data	Sumber Data
Menganalisis peran sektor kelapa terhadap perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir	Tabel Input-Output dan SNSE Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005. Data-data sekunder lainnya	Bappeda dan instansi terkait lainnya di Kabupaten Indragiri Hilir
Menganalisis kebocoran wilayah sektor kelapa	Tabel I-O, SNSE Inhil Tahun 2005, data sekunder dan primer lainnya	Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dan Kuisisioner
Menganalisis kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi angka kemiskinan	Tabel I-O, SNSE Inhil Tahun 2005, SUSENAS dan data-data sekunder lainnya	BPS, Bappeda dan instansi terkait lainnya di Kabupaten Indragiri Hilir

## **Metode Penyusunan SNSE Kabupaten Indragiri Hilir**

Metode pendekatan kegiatan dalam penyusunan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan dengan menggunakan metode survei dan nonsurvei. Dalam penyusunan SNSE Kabupaten Indragiri Hilir, peneliti merupakan salah satu anggota tim. Secara singkat data dasar yang digunakan dalam penyusunan SNSE Kabupaten Indragiri Hilir :

1. Hasil *updating* Input-Output (I-O) Kabupaten Indragiri Hilir 2005.
2. Laporan Survei Sosial Ekonomi (Susesnas).
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. PDRB sektor dan PDRB perkapita.
5. Kondisi kemiskinan.
6. Hasil estimasi permintaan akhir dan input primer.
7. Selain itu, juga dilakukan beberapa rekonsiliasi dan peralihan data sesuai dengan kondisi yang ada.

## **Klasifikasi SNSE Kabupaten Indragiri Hilir**

Klasifikasi yang digunakan dalam SNSE Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 dibagi dalam 2 klasifikasi yaitu :

- a. Klasifikasi agregat berukuran 9 x 9
- b. Klasifikasi agregat berukuran 56 x 56

Pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 dapat dilihat klasifikasi SNSE dan klasifikasi sektor produksi pada Tabel SNSE Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005.

Pada dasarnya SNSE Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005, baik yang berukuran 9 x 9 maupun 56 x 56 diklasifikasikan menjadi empat klasifikasi utama: (1) neraca faktor produksi, (2) neraca institusi, (3) neraca sektor produksi, dan (4) neraca eksogen (sisal).

## **Neraca Faktor Produksi**

Klasifikasi neraca faktor produksi pada SNSE Kabupaten Indragiri Hilir dibedakan atas tenaga kerja dan modal.

### **(a) Tenaga kerja**

Faktor produksi tenaga kerja dikelompokkan menjadi tenaga kerja pertanian dan tenaga kerja bukan pertanian. Tenaga kerja pertanian adalah tenaga kerja yang bergerak di sektor pertanian, termasuk didalamnya subsektor

perkebunan, tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan usaha-usaha yang berhubungan dengan sektor pertanian (jasa pertanian).

Tenaga kerja bukan pertanian adalah tenaga kerja yang bergerak diluar sektor pertanian. Kelompok ini mencakup seluruh tenaga kerja yang bergerak disemua sektor nonpertanian atau tidak berhubungan dengan sektor pertanian (jasa nonpertanian).

### **(b) Modal**

Faktor produksi modal dikelompokkan menjadi modal usaha yang tidak berbadan hukum dan modal usaha yang berbadan hukum. Modal usaha tidak berbadan hukum adalah modal usaha yang diinvestasikan pada usaha-usaha yang tidak berbadan hukum. Pada umumnya usaha-usaha yang tidak berbadan hukum merupakan usaha rumah tangga skala kecil yang dimiliki oleh perorangan.

Modal usaha berbadan hukum adalah modal usaha yang diinvestasikan pada usaha-usaha yang berbadan hukum. Pada umumnya usaha-usaha yang berbadan hukum merupakan usaha skala menengah dan besar yang pengelolaannya sudah menuntut profesionalisme. Modal usaha berbadan hukum dapat berupa modal swasta dalam negeri, pemerintah, dan modal asing.

### **Neraca Institusi**

Neraca institusi diklasifikasikan menjadi tiga jenis institusi: rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah.

### **(a) Rumah Tangga**

Rumah tangga yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah rumah tangga yang berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir. Pengertian rumah tangga dalam kerangka SNSE Kabupaten Indragiri Hilir merupakan konsep rumah tangga yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik, yaitu sekelompok orang yang tinggal dalam satu atau makan dari satu dapur. Rumah tangga dalam konsep ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu rumah tangga pertanian dan rumah tangga bukan pertanian.

Rumah tangga pertanian adalah rumah tangga yang aktivitas ekonomi anggota rumah tangganya bergerak disektor pertanian, termasuk didalamnya subsektor perkebunan, tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan dan usaha-usaha yang berhubungan dengan sektor pertanian (jasa pertanian). Rumah tangga pertanian selanjutnya dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu rumah tangga buruh tani, rumah tangga pengusaha pertanian dengan luas lahan 0,00 – 1,00 hektar, dan rumah tangga pengusaha pertanian dengan luas lahan di atas 1,00 hektar.

Rumah tangga bukan pertanian adalah rumah tangga yang aktivitas ekonomi anggota rumah tangganya bergerak diluar sektor pertanian atau tidak berhubungan dengan sektor pertanian (jasa nonpertanian). Rumah tangga bukan pertanian selanjutnya dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu rumah tangga desa golongan bawah, rumah tangga desa golongan atas, rumah tangga kota golongan bawah, dan rumah tangga kota golongan atas.

Anggota rumah tangga adalah mereka yang bertempat-tinggal dan menjadi tanggungan rumah tangga bersangkutan. Anggota rumah tangga yang telah berdomisili di wilayah lain lebih dari enam bulan dianggap bukan lagi menjadi anggota rumah tangga tersebut.

Pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga bersangkutan, baik yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota rumah tangga. Pendapatan rumah tangga dapat berasal dari balas jasa faktor produksi tenaga kerja (upah dan gaji, keuntungan, bonus, dan lain-lain), balas jasa kapital (bunga, deviden, bagi hasil, dan lain-lain), dan pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain (transfer).

### **(b) Perusahaan**

Perusahaan yang dimaksud dalam kegiatan SNSE Kabupaten Indragiri Hilir 2005 adalah perusahaan swasta yang menjalankan operasi bisnis atau kegiatan ekonominya di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Perusahaan tersebut dapat bergerak di bidang pertanian dan bukan pertanian.

### **(c) Pemerintah**

Pemerintah yang dimaksud dalam kegiatan SNSE Kabupaten Indragiri Hilir adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

### **Neraca Sektor Produksi**

Klasifikasi sektor produksi dalam kerangka SNSE Kabupaten Indragiri Hilir 2005 merupakan replikasi klasifikasi lapangan usaha yang terdapat pada tabel Input-Output Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2005. Seperti yang terdapat pada Tabel I-O Kabupaten Indragiri Hilir, neraca sektor produksi terdiri atas: (1) permintaan antara dan (2) permintaan akhir. Neraca permintaan antara terdiri dari atas (1) permintaan antara atas PDRB yang sama dan (2) permintaan antara atas PDRB yang berbeda.

Sedangkan neraca permintaan akhir terdiri atas: (1) neraca permintaan institusi; (2) margin perdagangan; (3) subsidi; (4) neraca kapital swasta; dan (5) neraca ekspor. Proposi permintaan akhir institusi total diambil dari Tabel I-O dan permintaan akhir rumah tangga menurut jenis/golongan yang dibagi berdasarkan data Susenas. Sedangkan permintaan akhir pemerintah dibagi

berdasarkan data anggaran pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Data Neraca kapital swasta dan ekspor diambil dari Tabel I-O, sedangkan margin perdagangan dan subsidi diperoleh dari perhitungan

**Neraca Eksogen**

Klasifikasi neraca eksogen dalam kegiatan SNSE Kabupaten Indragiri Hilir meliputi neraca kapital, pajak tidak langsung, dan neraca luar negeri (*the rest of the wo*

**ANALISIS DATA**

**Analisis Deskriptif.**

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui peran sektor kelapa terhadap perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir ditinjau dari aspek output, PDRB, dan tenaga kerja.

**Analisis Indeks Daya Penyebaran dan Derajat Kepekaan**

Keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) sering disebut sebagai daya penyebaran, dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*) sering disebut sebagai derajat kepekaan.

Untuk mengukur daya penyebaran sektor digunakan rumus :

$$\alpha_j = \frac{\sum_i b_{ij}}{\left(\frac{1}{n}\right) \sum_i \sum_j b_{ij}} \dots\dots\dots (1)$$

Selanjutnya untuk menganalisis besar kecilnya derajat kepekaan (keterkaitan ke depan) digunakan rumus :

$$\beta_i = \frac{\sum_j b_{ij}}{\left(\frac{1}{n}\right) \sum_i \sum_j b_{ij}} \dots\dots\dots (2)$$

**Analisis Pengganda Otput, Nilai Tambah Bruto, Pendapatan dan Tenaga Kerja**

Pengganda Output :

$$X = (1 - A)^{-1} F \dots\dots\dots (3)$$

X : Output yang terbentuk akibat perubahan permintaan akhir

$(1 - A)^{-1}$  : Matrik pengganda

F : Permintaan akhir

Pengganda Nilai Tambah :

$$V = \hat{V} X \dots\dots\dots (4)$$

V : Nilai Tambah Bruto yang terbentuk akibat perubahan permintaan akhir

$\hat{V}$  : Matrik diagonal koefisien Nilai Tambah Bruto

X : Dampak permintaan akhir =  $(I - A)^{-1} F$

Pengganda Pendapatan :

$$W = \hat{W} X \dots\dots\dots (5)$$

dimana W adalah matriks *income*,  $\hat{W}$  matrik diagonal koefisien *income*, dan X merupakan matrik  $X=(1-A)^{-1}.F^d$ .

Pengganda Tenaga Kerja :

$$E = \hat{L}(I - A^d)^{-1} \dots\dots\dots (6)$$

E = Matriks pengganda tenaga kerja dan

$\hat{L}$  = Matriks koefisien tenaga kerja yaitu berisi rasio tenaga kerja terhadap total input tiap sektor.

### Analisis Pegganda Kebijakan

Pyatt & Round (1979) melakukan dekomposisi terhadap pengganda neraca yang hasilnya adalah sebagai berikut:

$$M_a = M_3 M_2 M_1 \dots\dots\dots (7)$$

dimana:

M<sub>a</sub> : Matrik dekomposisi Pegganda

M<sub>1</sub> : Pegganda *transfer*, menunjukkan pengaruh dari satu blok pada dirinya sendiri.

M<sub>2</sub> : Pegganda *open loop* atau *cross-effect*, merupakan pengaruh dari suatu blok ke blok yang lain. Injeksi pada salah satu sektor dalam sebuah blok tertentu akan berpengaruh terhadap sektor lain di blok yang lain setelah melalui keseluruhan sistem dalam blok yang lain tersebut.

M<sub>3</sub> : Pegganda *closed loop*, merupakan pengaruh dari suatu blok ke blok yang lain, untuk kemudian kembali pada blok semula.

Dekomposisi matrik pengganda neraca persamaan (7) dapat juga dibuat menjadi bentuk aditif, yaitu :

$$Ma = I + (Ma_1 - I) + (Ma_2 - I)Ma_1 + (Ma_3 - I)Ma_2 Ma_1 \dots\dots (8)$$

Bentuk persamaan (8) menunjukkan matriks identitas, I menggambarkan dampak awal injeksi neraca eksogen terhadap neraca endogen, sedangkan bentuk kedua, ketiga, dan keempat pada persamaan tersebut disebut sebagai pengganda transfer (*transfer multiplier*), pengganda putaran terbuka (*open loop multiplier*), dan pengganda putaran tertutup (*close loop multiplier*)

**(a) Pengganda Transfer**

Pyatt and Round (1988) mengungkapkan  $Ma_1$  adalah pengganda transfer, yang menunjukkan pengaruh dari satu blok pada diri sendiri

$$Ma_1 = (I - A^0)^{-1} \dots\dots\dots (9)$$

$A^0$  adalah matrik diagonal dari matriks A, yaitu

$$A^0 = \begin{bmatrix} O & O & O \\ O & A_{22} & O \\ O & O & A_{33} \end{bmatrix} \dots\dots\dots (10)$$

Sehingga matrik pengganda transfer ( $Ma_1$  dalam bentuk matrik dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$Ma_1 = \begin{bmatrix} I & O & O \\ O & (I - A_{22})^{-1} & O \\ O & O & (I - A_{33})^{-1} \end{bmatrix} \dots\dots\dots (11)$$

Melalui pengganda transfer ( $Ma_1$ ) ini, dapat diketahui pengaruh injeksi pada sebuah sektor terhadap sektor lain dalam satu blok yang sama, setelah melalui keseluruhan sistem didalam blok tersebut, sebelum berpengaruh terhadap blok yang lain. Dalam memahami  $Ma_1$  seolah-olah ada asumsi bahwa injeksi pada suatu sektor hanya berpengaruh terhadap sektor-sektor lain dalam blok yang sama dan tidak terhadap sektor-sektor yang berada pada blok yang lain. Oleh karena itu  $Ma_1$  disebut sebagai pengganda transfer.

Matrik  $Ma_1$  pada persamaan (11) dapat diketahui besarnya pengganda pada masing-masing blok. Pada blok kegiatan produksi misalnya, besarnya pengganda transfer adalah  $(I - A_{33})^{-1}$ . Ini berarti bahwa setiap injeksi pada salah satu sektor produksi akan berpengaruh pada sektor produksi yang lain sebesar injeksi tersebut, yang dikalikan dengan  $(I - A_{33})^{-1}$ . Dalam model I-O  $(I - A_{33})^{-1}$  tidak lain adalah matrik kebalikan leontif.

Blok Institusi, besarnya pengganda transfer adalah  $(I-A_{22})^{-1}$ . Ini berarti setiap injeksi pada salah satu institusi akan berpengaruh pada institusi yang lain sebesar injeksi tersebut, dikalikan dengan  $(I-A_{22})^{-1}$ .

Blok faktor produksi, besarnya pengganda transfer adalah  $I$ . Hal tersebut berarti bahwa injeksi pada salah satu faktor produksi hanya akan berpengaruh terhadap faktor produksi yang di injeksi tersebut, tidak terhadap faktor produksi lain. Misalnya dilakukan injeksi terhadap tenaga kerja pertanian perkebunan kelapa penerima upah dan gaji di perdesaan sebesar Rp100, maka yang bertambah hanyalah penerimaan tenaga kerja penerima upah dan gaji di perdesaan itu sendiri, sebesar Rp 100. Faktor produksi yang lain tidak mengalami perubahan apa-apa.

## 2). Pengganda Open Loop

Pyatt and Round (1988) mengungkapkan  $M_{a2}$  adalah pengganda *open loop* atau *cross-efek*, yang merupakan pengaruh dari satu blok ke blok yang lain. Injeksi pada salah satu sektor dalam sebuah blok tertentu akan berpengaruh terhadap sektor lain di blok yang lain setelah melalui keseluruhan sistem dalam blok yang lain. Matrik tersebut didefinisikan sebagai:

$$M_{a2} = (I + A^* + A^{*2}) \dots\dots\dots (12)$$

Dimana

$$A^* = (I - A^0)^{-1} (A - A^0)Y$$

Sehingga  $A^*$  merupakan sebuah matrik dengan :

$$A^*_{13} = A_{13} \dots\dots\dots (13)$$

$$A^*_{21} = (I - A_{22})^{-1} A_{21} \dots\dots\dots (14)$$

$$A^*_{23} = (I - A_{33})^{-1} A_{32} \dots\dots\dots (15)$$

Sedangkan sel yang lain berisi angka atau matrik nol.

$$A^* = \begin{bmatrix} 0 & 0 & A^*_{13} \\ A^*_{21} & 0 & 0 \\ 0 & A^*_{32} & 0 \end{bmatrix} \dots\dots\dots (16)$$

Dengan demikian pengganda *open loop* adalah

$$M_{a2} = \begin{bmatrix} I & A^*_{13} A^*_{32} & A^*_{13} \\ A^*_{21} & I & A^*_{21} A^*_{13} \\ A^*_{32} A^*_{21} & A^*_{32} & I \end{bmatrix} \dots\dots\dots (17)$$

### 3). Pengganda *Closed Loop*

Pyatt and Round mengungkapkan  $M_{a3}$  adalah pengganda *closed loop*, atau sering disebut pengganda putaran tertutup yang menggambarkan pengaruh dari suatu blok ke blok yang lain, yang kemudian kembali pada blok semula. Matrik pengganda tersebut didefinisikan sebagai:

$$M_{a3} = (1 - A^{*3})^{-1} \dots\dots\dots (18)$$

$M_{a3}$  merupakan matrik diagonal, yang diagonal utamanya secara berurutan dari kiri atas ke kanan bawah berisi  $(I - A_{13}^* A_{32}^* A_{21}^*)^{-1}$ ,  $(I - A_{21}^* A_{13}^* A_{32}^*)^{-1}$  dan  $(I - A_{32}^* A_{21}^* A_{13}^*)^{-1}$

Injeksi pada salah satu faktor produksi akan berpengaruh pada sektor-sektor lain pada blok institusi, kemudian berpengaruh pada blok kegiatan produksi, dan akhirnya berpengaruh kembali kepada sektor-sektor dalam blok faktor produksi. Satu putaran dari blok faktor produksi kembali ke blok faktor produksi ini disebut pengaruh *closed loop* faktor produksi, dengan pengganda sebesar  $(I - A_{13}^* A_{32}^* A_{21}^*)^{-1}$

Demikian pula dengan blok institusi dan kegiatan produksi. Injeksi pada salah satu sektor dalam blok institusi pada akhirnya akan berpengaruh *closed loop* pada sektor-sektor dalam blok institusi itu sendiri, setelah berpengaruh pada blok kegiatan produksi dan faktor produksi, dengan pengganda sebesar  $(I - A_{21}^* A_{13}^* A_{32}^*)^{-1}$ . Sedangkan pengganda *closed loop* untuk blok kegiatan produksi adalah sebesar  $(I - A_{32}^* A_{21}^* A_{13}^*)^{-1}$ .

### Analisis Kebocoran Wilayah

Kebocoran wilayah pada sektor kelapa dapat dilihat dengan menghitung ratio pendapatan modal yang keluar wilayah terhadap total pendapatan modal dan ratio pendapatan tenaga kerja yang keluar wilayah terhadap total pendapatan tenaga kerja atau dilihat dari besarnya aliran sumberdaya finansial (*Capital Outflow*) yang keluar wilayah (Rustiadi, 2005). Kebocoran wilayah juga dapat dilihat dari rasio ekspor terhadap total output, rasio ekspor terhadap total permintaan antara, rasio impor terhadap total input antara (Bendavid, 1991) Kriteria lainya adalah indeks keterkaitan kedepan (*forward linkage*) dan indeks keterkaitan belakang (*backward linkage*). Bila nilainya lebih kecil dari rata-rata seluruh sektor (<1) mengindikasikan sektor tersebut mengalami kebocoran wilayah (Reis dan Rua, 2006).

### Analisis Kemiskinan

Untuk mengkaji dampak investasi sektor kelapa terhadap insiden kemiskinan (*poverty incidence*) digunakan indeks kemiskinan FGT (*Foster-Greer-Thorbecke*).

$$P_{\alpha}(y; z) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left( \frac{z - y_i}{z} \right)^{\alpha}, (\alpha \geq 0) \dots\dots\dots (19)$$

dimana  $y_i$  adalah rata-rata nilai pengeluaran per kapita individu ke  $i$  dalam rumah tangga, total populasi dinyatakan sebagai  $n$ , jumlah populasi miskin adalah  $q$  dan batas kemiskinan adalah  $z$ .

Nilai  $\alpha$  ada tiga macam, yaitu:

**Nilai  $\alpha = 0$** , menyatakan *headcount index* merupakan proporsi populasi yang berada di bawah garis kemiskinan dengan rumus :

$$P_0(y; z) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left( \frac{z - y_i}{z} \right)^0 \text{ atau } P_0 = q / n \dots\dots\dots (20)$$

**Nilai  $\alpha = 1$** , menyatakan ukuran *poverty gap ratio* atau kesenjangan kemiskinan seluruh populasi miskin terhadap garis kemiskinan dengan rumus

$$P_1(y; z) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left( \frac{z - y_i}{z} \right) \dots\dots\dots (21)$$

**Nilai  $\alpha = 2$** , dinamakan rasio “keparahan” kemiskinan (*poverty severity*).

$$P_2(y; z) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left( \frac{z - y_i}{z} \right)^2 \dots\dots\dots (22)$$

### Simulasi Kebijakan

Pertumbuhan APBD Kabupaten Indragiri Hilir selama kurun waktu tahun 2001 sampai tahun 2005 berkisar antara 50 milyar sampai 100 milyar per tahun (Biro Keuangan Setda Indragiri Hilir, 2005). Oleh karena itu, kebijakan APBD yang dapat dialokasikan untuk peningkatan anggaran pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sektor perekonomian masyarakat sebesar 50 milyar rupiah per tahun. Berdasarkan kondisi tersebut, maka besarnya alokasi anggaran untuk peningkatan investasi, dalam simulasi kebijakan dalam penelitian ini adalah sebesar 50 milyar rupiah.

Simulasi 1 (S1) : Peningkatan investasi di sektor kelapa sebesar 50 milyar

Simulasi 2 (S2) : Peningkatan investasi di sektor industri kelapa skala besar (swasta) sebesar 50 milyar

Simulasi 3 (S3) : Peningkatan investasi di sektor industri kelapa skala rumah tangga sebesar 50 milyar

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil SNSE Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005

Hasil SNSE Kabupaten Indragiri tahun 2005 diperlihatkan pada matriks SNSE ukuran 9 x 9 (seperti pada Tabel 2) sebagai hasil agregasi dari matrik 56 x 56. Pada Tabel 2 terlihat bahwa total nilai output yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi sebesar Rp 7.878.567 juta yang terdiri dari output domestik sebesar Rp 7.143.499 juta dan nilai impor sebesar Rp 735.067 juta. Dari total output domestik tersebut nilai tambah yang dihasilkan di daerah ini berjumlah sekitar Rp 4.654.045 juta, atau sekitar 65,15 persen dari total output domestik. Nilai tambah ini dapat dihitung dari dua sisi yakni dari sisi suplai yang merupakan penjumlahan balas jasa faktor produksi tenaga kerja sebesar Rp 1.508.751 juta, modal (termasuk penyusutan) sebesar Rp 2.919.575 juta, dan pajak tak langsung sebesar Rp 225.719 juta. Perhitungan nilai tambah juga dapat dihitung dari sisi permintaan yang merupakan akumulasi dari permintaan konsumsi rumah tangga sebesar Rp 2.562.929 juta, permintaan konsumsi pemerintah sebesar Rp 513.097 juta, investasi sebesar Rp 284.393 juta, Ekspor sebesar Rp 2.028.694 juta dikurang impor yang jumlahnya sebesar Rp 735.067 juta.

Besarnya nilai tambah faktor produksi tenaga kerja yang keluar wilayah berjumlah sebesar Rp 182.098 juta. Sedangkan, besarnya pendapatan modal yang keluar wilayah adalah Rp 374.329 juta. Sebaliknya terdapat balas jasa faktor produksi tenaga kerja yang berasal dari luar wilayah yang memberi tambahan tenaga kerja rumah tangga dalam wilayah yang jumlahnya sebesar Rp 8.731 juta dan pendapatan modal yang berasal dari luar jumlahnya sekitar Rp 8.452 juta.

Pendapatan dari seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir diperkirakan sebesar Rp 3.053.622 juta selama tahun 2005, yang bersumber dari pendapatan tenaga kerja sebesar Rp 1.335.384 juta, dari pendapatan modal sebesar Rp 1.604.266 juta dan sisanya berasal dari transfer berbagai institusi sebesar Rp 113.972 juta. Rata-rata pendapatan pada kelompok rumah tangga pendapatan tinggi diperkotaan mencapai Rp 79,19 juta per rumah tangga per tahun, sedangkan pendapatan rumah tangga paling kecil pada kelompok rumah tangga pendapatan rendah di perdesaan dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 6.42 juta per rumah tangga per tahun. Selanjutnya total pendapatan institusi perusahaan diperkirakan sebesar Rp 758.968 juta. Sedangkan penerimaan pemerintah diperkirakan sebesar Rp 950.927 juta. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sistem Neraca Sosial Ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2005 (9 x 9) (Rp Juta)

	I. Faktor Produksi		II. Institusi			III. Sektor Produksi	IV. Neraca Kapital	V. Pajak Tak Langsung minus subsidi	VII. The Rest of The World	Jumlah
	Tenaga Kerja	Modal	Rumah tangga	Perusahaan	Pemerintah					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Faktor Produksi										
Tenaga Kerja	1					1.508.750,79			8.730,65	1.517.481,43
Modal	2					2.919.574,96			8.452,87	2.928.027,82
II. Institusi										
Rumah tangga	3	1.604.266,42	38.281,75	33.002,73	42.687,70				0,00	3.053.622,27
Perusahaan	4	695.182,12	0,00	63.785,52	0,00				0,00	758.967,63
Pemerintah	5	254.250,46	7.016,03	15.616,33	448.324,66			225.719,43	0,00	950.926,92
III. Sektor Produksi										
Neraca Kapital	6		2.562.928,77		513.096,65	2.489.454,56	284.392,95		2.028.693,74	7.878.566,66
V. Pajak Tak Langsung minus subsidi	7		445.395,71	646.563,05	-53.182,09					1.038.776,67
VII. The Rest of The World	8	182.097,77	374.328,83	0,00	0,00	735.066,93	754.383,72			2.045.877,26
Jumlah	9	1.517.481,43	2.928.027,82	3.053.622,27	758.967,63	7.878.566,66	1.038.776,67	225.719,43		2.045.877,26

## Peran Sektor Kelapa dan Sektor Industri Pengolahan Kelapa terhadap Perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir

Pada Tabel 3 dapat dilihat peran sektor kelapa terhadap perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 3. Peran Sektor Kelapa terhadap Perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir

Parameter	Total Wilayah (Persen)	Sektor Pertanian (persen)	
		Agregat	Subsektor Perkebunan
Output	13,44	34,68	79,85
NTB	17,86	36,03	69,77
Tenaga kerja	27,92	37,57	81,55

Dari Tabel 3 di atas terlihat bahwa peran sektor kelapa sangat berarti terutama dalam penyebaran tenaga kerja yaitu mencapai 27,92 persen. Dominannya sektor kelapa dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Indragiri Hilir perlu menjadi perhatian untuk dipertahankan dan ditingkatkan peranannya dalam pengembangan sektor tersebut. Sedangkan dari sisi nilai tambah bruto terlihat bahwa kontribusi sektor kelapa yaitu sebesar 17,86 persen. Demikian juga dari sisi pembentukan output perekonomian terlihat sektor kelapa memiliki kontribusi sebesar 13,44 persen

Dari hasil analisis di atas dapat dinyatakan bahwa secara umum sektor kelapa ditinjau dari aspek pembentukan output, nilai tambah bruto, dan serapan tenaga kerja di Kabupaten Indragiri Hilir, terlihat masih memiliki peran yang sangat besar dan berarti bagi perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan demikian, pengembangan sektor kelapa dalam pengembangan perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kegiatan yang patut terus didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Tabel 4 dapat dilihat peran sektor industri pengolahan kelapa terhadap perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir.

Selanjutnya sektor industri pengolahan kelapa (industri pengolahan kelapa skala besar dan industri pengolahan kelapa skala rumah tangga) terhadap pembentukan output total wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebesar 21,05 persen, terhadap pembentukan output sektor industri sebesar 92,74 persen. Kemudian kontribusinya terhadap pembentukan nilai tambah bruto (NTB) total wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebesar 15,76 persen, terhadap pembentukan NTB sektor industri 95,14 persen. Selanjutnya dari sisi serapan tenaga kerja menunjukkan sektor industri kelapa berkontribusi sebesar 3,26 persen terhadap serapan tenaga kerja total Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian serapan tenaga kerja dalam sektor industri sebesar 89,91 persen.

Tabel 4. Peran Sektor Industri Pengolahan Kelapa terhadap Perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir

Parameter	Total Wilayah (persen)	Sektor Industri (persen)
Output	21,05	92,74
NTB	15,76	95,14
Tenaga kerja	3,26	89,91

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa industri kelapa merupakan industri dominan yang dikembangkan di Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini tercermin dari sisi output, nilai tambah bruto, dan penyerapan tenaga kerja. Dimana dari sisi penyerapan tenaga kerja saja sektor industri kelapa mendominasi penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu mencapai 89,91 persen.

### Indeks Keterkaitan ke Depan dan ke Belakang Sektor Kelapa

Sektor kelapa memiliki keterkaitan ke belakang yang masih lemah dengan indeks keterkaitan ke belakang sebesar 0,75. Sedangkan sektor industri pengolahan kelapa skala besar dan sektor industri kelapa skala rumah tangga sudah memiliki keterkaitan ke belakang yang relatif kuat dengan nilai indeks keterkaitan ke depan untuk industri kelapa skala rumah tangga sebesar 1,03, industri kelapa skala besar (swasta) sebesar 1,08. Selanjutnya sektor industri kelapa skala rumah tangga memiliki keterkaitan ke depan yang lemah dengan nilai indeks keterkaitan ke depan sebesar 0,71. Sedangkan sektor kelapa dan sektor industri kelapa skala besar (swasta) telah memiliki keterkaitan ke depan yang kuat, dengan nilai indeks masing-masing sebesar 1,75 dan 2,20 (Tabel 5)

Tabel 5. Indeks Keterkaitan ke Depan dan Ke Belakang Sektor Kelapa dan Industri Pengolahannya

Sektor	Indeks Keterkaitan ke Depan	Indeks Keterkaitan ke Belakang
Kelapa	1,75	0,75
Industri kelapa skala besar (swasta)	2,20	1,08
Industri kelapa skala rumah tangga	0,71	1,03

### Indikasi dan Potensi Kebocoran Wilayah Sektor Kelapa dan Industri Pengolahan Kelapa

Berdasarkan keterkaitan ke depan terlihat sektor industri kelapa skala rumah tangga masih memiliki keterkaitan yang lemah yang ditunjukkan oleh nilai indeks keterkaitan ke depan yang lebih kecil dari 1, yaitu sebesar 0,71, artinya

sektor industri kelapa skala rumah tangga masih memiliki keterkaitan pasar yang lemah atau mengalami indikasi kebocoran wilayah. Namun untuk sektor kelapa dan industri kelapa skala besar (swasta) sudah memiliki keterkaitan ke depan yang kuat (Tabel 6). Selanjutnya bila dilihat dari keterkaitan ke belakang maka sektor kelapa memiliki keterkaitan ke belakang yang lemah yaitu sebesar 0,75 atau lebih kecil dari satu dan mengindikasikan terjadinya kebocoran wilayah di sektor kelapa. Hal ini terjadi karena besarnya komponen impor dari input antara yang digunakan dengan nilai rasio sebesar 0,36 (Tabel 6). Komponen input antara di sektor kelapa yang berasal dari komponen impor seperti herbisida, insektisida, fungisida, dan pupuk. Sedangkan untuk sektor industri kelapa skala besar (swasta) dan industri kelapa skala rumah tangga telah memiliki keterkaitan ke belakang yang kuat karena telah memiliki nilai indeks keterkaitan lebih besar dari 1 (Tabel 6).

Tabel 6. Indikasi dan Potensi Kebocoran Wilayah Sektor Kelapa dan Industri Pengolahannya

Sektor	Ratio				
	EO	EPA	II	PTK	PMK
Kelapa	0,42	0,73	0,36	0,11	0,09
Industri kelapa skala besar (swasta)	0,61	1,89	0,34	0,39	0,57
Industri kelapa skala rumah tangga	0,43	1,87	0,16	0,10	0,12

Keterangan:

EO : Ekspor terhadap total output

EPA : Ekspor terhadap total permintaan antara

II : Imput antara dari komponen impor terhadap total input antara

PTK : Pendapatan tenaga kerja keluar wilayah terhadap total pendapatan tenaga kerja

PMK : Pendapatan modal keluar wilayah terhadap total pendapatan tenaga kerja

Kebocoran wilayah di sektor kelapa dominan terjadi pada sektor industri kelapa skala besar akibat adanya aliran modal atau finansial (*capital outflow*) yang keluar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, dimana pendapatan modal yang mengalami kebocoran mencapai 57 persen dari total pendapatan modal industri kelapa skala besar atau setara dengan 255,20 milyar rupiah dan kebocoran aliran pendapatan tenaga kerja yang keluar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 39 persen dari total pendapatan tenaga kerja industri kelapa skala besar atau setara dengan 63,55 milyar rupiah (Tabel 6).

### Dampak Kebocoran Wilayah di Sektor Kelapa dan Industri Pengolahan Kelapa

Dampak kebocoran wilayah disektor kelapa dan industri pengolahan kelapa dapat dilihat dari besarnya aliran pendapatan modal dan tenaga kerja yang keluar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Pada Tabel 7 terlihat bahwa total

kebocoran wilayah sektor kelapa sebesar 77,73 milyar rupiah yang terdiri dari 41,99 milyar rupiah dari aliran pendapatan modal yang keluar wilayah dan 35,74 milyar rupiah dari aliran pendapatan tenaga kerja yang keluar wilayah. Sedangkan kebocoran wilayah sektor industri kelapa skala besar mencapai 318,97 milyar rupiah terdiri dari 225,42 milyar rupiah dari aliran pendapatan modal yang keluar wilayah dan 63,55 milyar rupiah dari aliran pendapatan tenaga kerja yang keluar wilayah. Selanjutnya, total pendapatan modal yang keluar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir untuk sektor kelapa dan industri pengolahannya mencapai 300,2 milyar rupiah dan total pendapatan tenaga kerja yang keluar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 100,79 milyar rupiah (Tabel 7).

Tabel 7. Dampak Kebocoran di Sektor Kelapa dan Industri Pengolahan Kelapa

Sektor	Pendapatan Modal Ke Luar Wilayah (Milyar Rupiah)	Pendapatan Tenaga Kerja Ke Luar Wilayah (Milyar Rupiah)	Jumlah
Kelapa	41,99	35,74	77,73
Industri Kelapa Skala Besar (Swasta)	255,42	63,55	318,97
Industri Kelapa Skala Rumah Tangga	2,79	1,50	4,29
Jumlah	300,2	100,79	285,07

### **Multiplier Effect Sektor Kelapa dan Sektor Industri Pengolahan Kelapa**

Dari hasil analisis *multiplier effect* terlihat bahwa sektor Kelapa memiliki koefisien pengganda output sebesar 4,92, koefisien pengganda nilai tambah sebesar 5,47, koefisien pengganda pendapatan sebesar 7,10, dan koefisien pengganda tenaga kerja sebesar 4,81. Makna dari koefisien pengganda output tersebut adalah setiap peningkatan permintaan akhir sektor kelapa sebesar satu satuan, maka output perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir akan meningkat sebesar ekuivalen 4,93. Dengan kata lain, apabila setiap permintaan akhir (*final demand*) sektor Kelapa meningkat sebesar 1 milyar rupiah, maka dampaknya terhadap output perekonomian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebesar 4,93 milyar rupiah (Tabel 8).

Tabel 8. *Multiplier Effect* Sektor Kelapa dan Industri Pengolahannya

Sektor	Koefisien Pengganda			
	Output	NTB	Pendapatan	Tenaga Kerja
Kelapa	4,92	6,47	7,10	4,81
Industri Kelapa Skala Besar (Swasta)	7,29	5,66	5,10	0,43
Industri Kelapa Skala Rumah Tangga	0,54	0,35	0,46	1,71

Pada Tabel 8 terlihat bahwa sektor industri kelapa skala besar (swasta) memiliki dampak pengganda tenaga kerja yang lebih kecil yaitu 0,43

dibandingkan dengan sektor kelapa dan sektor industri kelapa skala rumah tangga dengan nilai koefisien pengganda tenaga kerja masing-masing 4,81 dan 1,71. Hal ini menunjukkan bahwa industri kelapa skala besar menyerap lapangan kerja yang lebih kecil karena padat modal dan teknologi, sementara sektor kelapa dan industri kelapa skala rumah tangga justru padat tenaga kerja.

### Dampak Investasi di Sektor Kelapa terhadap Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir

Simulasi S1 memberikan persentase pertumbuhan pendapatan yang paling tinggi kepada masing-masing rumah tangga yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disusul oleh simulasi S2 dan S3 (Tabel 9). Hal ini terjadi karena simulasi S1 yang merupakan investasi disektor perkebunan kelapa langsung menyentuh sebagian besar masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang memang merupakan petani kelapa. Sedangkan bila investasi dilakukan pada sektor industri kelapa skala besar (S2) memberikan pengaruh yang rendah terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hilir, karena hanya sebagian kecil rumah tangga yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yang bekerja di sektor industri kelapa skala besar tersebut.

Tabel 9. Persentase Pertumbuhan Pendapatan Masing-masing Simulasi Kebijakan

Rumah Tangga	Nilai Dasar (Juta)	Perubahan					
		S1		S2		S3	
		Nilai (Juta)	%	Nilai (Juta)	%	Nilai (Juta)	%
Buruh tani	347.232	354.292	2,03	353.714	1,87	354.068	1,97
Petani lahan 0-1 ha	383.990	391.835	2,04	391.227	1,88	391.597	1,98
Petani lahan > 1 ha	897.125	915.586	2,06	914.407	1,93	915.105	2,00
Desa gologan bawah	55.478	56.626	2,07	56.512	1,86	56.583	1,99
Desa golongan atas	613.642	626.637	2,12	625.310	1,90	626.142	2,04
Kota golongan bawah	105.855	108.083	2,10	107.823	1,86	107.988	2,01
Kota golongan atas	650.296	664.068	2,12	662.661	1,90	663.543	2,04

Simulasi S1, S2, dan S3 memberikan pengaruh yang sama terhadap penurunan persentase kemiskinan di setiap kelompok rumah tangga yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Rumah tangga yang mengalami penurunan kemiskinan hanya rumah tangga petani yang memiliki lahan 0,00 – 1,00 hektar sebesar 2,78 persen dan rumah tangga petani yang memiliki lahan > 1,00 hektar. Sedangkan pada kelompok rumah tangga lainnya tidak mengalami penurunan kemiskinan. Namun bila dilihat dari penurunan *poverty gap* dan *poverty severity* terlihat bahwa setiap simulasi kebijakan dapat menurunkan kedua indikator kemiskinan tersebut. Penurunan *poverty gap* dan *poverty severity* yang paling tinggi terjadi pada simulasi S1 yaitu masing-masing sebesar 7,24 persen dan 6,69 persen pada kelompok rumah tangga desa golongan atas (Tabel 10).

Tabel 10. Persentase Penurunan Tingkat Kemiskinan, *Poverty Gap* dan *Poverty Severity* Masing-masing Kebijakan

Rumah Tangga	Penurunan Kemiskinan (%)			Penurunan <i>Poverty Gap</i> (%)			Penurunan <i>Poverty Severity</i> (%)		
	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S1	S2	S3
Buruh tani	0,00	0,00	0,00	2,00	1,88	1,97	2,34	2,16	2,30
Petani lahan 0-1 ha	2,78	2,78	2,78	1,58	1,46	1,53	2,57	2,37	2,49
Petani lahan > 1 ha	5,66	5,66	5,66	3,61	3,43	3,53	4,18	3,92	4,06
Desa golongan bawah	0,00	0,00	0,00	2,50	2,29	2,42	2,89	2,61	2,78
Desa golongan atas	0,00	0,00	0,00	7,24	4,00	7,11	6,69	5,67	6,47
Kota golongan bawah	0,00	0,00	0,00	2,57	2,38	2,50	3,30	2,96	3,17
Kota golongan atas	0,00	0,00	0,00	2,39	2,14	2,30	4,65	4,17	4,48

### Dampak Investasi di Sektor Kelapa dan Industri Pengolahan Kelapa terhadap Perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir

Simulasi S1 memberikan dampak yang lebih tinggi terhadap pendapatan faktor produksi dan pendapatan sektor produksi yaitu sebesar masing-masing 2,07 persen dan 2,08 persen bila dibandingkan dengan simulasi S2 dan S3. Namun bila dilihat dari pertumbuhan sektor produksi simulasi S3 memberikan pertumbuhan yang paling tinggi yaitu 2,79 persen bila dibandingkan dengan simulasi S1 dan S2 (Tabel 11).

Tabel 11. Dampak Masing-Masing Simulasi Kebijakan terhadap Pertumbuhan Pendapatan Faktor Produksi, Rumah Tangga, dan Sektor Produksi

Simulasi	Rataan Pertumbuhan Neraca Regional (%)		
	Faktor Produksi	Rumah Tangga	Sektor Produksi
S1	2,07	2,08	2,46
S2	1,92	1,90	2,70
S3	2,01	2,01	2,79

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Sektor kelapa dan industri pengolahan kelapa memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan output, PDRB, dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Indragiri Hilir serta memiliki *multiplier effect* yang positif terhadap output, nilai tambah, pendapatan, dan tenaga kerja yang positif. Indeks keterkaitan ke depan sektor kelapa masih rendah yaitu 0,75 dan sektor

pengolahan kelapa skala rumah tangga juga memiliki keterkaitan ke belakang yang lemah dengan nilai indeks keterkaitan sebesar 0,71.

Kebocoran wilayah sektor kelapa dominan terjadi pada sektor industri kelapa skala besar akibat adanya aliran modal atau finansial (*capital outflow*) yang keluar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Simulasi S1, S2 dan S3 hanya mampu menurunkan kemiskinan (*headcount indeks*) pada kelompok rumah tangga pertanian yang memiliki lahan 0,00 – 1,00 ha sebesar 2,78 persen dan rumah tangga pertanian yang memiliki lahan > 1,00 ha sebesar 5,57 persen. Simulasi S3 memberikan peningkatan pertumbuhan sektor produksi yang paling tinggi yaitu sebesar 2,79 persen. Sedangkan Simulasi S1 memberikan dampak peningkatan pendapatan rumah tangga dan faktor produksi yang paling tinggi yaitu masing-masing sebesar 2,08 persen dan 2,07 persen.

Simulasi S1 memberikan peningkatan pendapatan dan menurunkan kemiskinan yang cenderung lebih tinggi bila dibandingkan dengan simulasi S2 dan S3.

## SARAN KEBIJAKAN

Kebijakan investasi di sektor kelapa dan sektor industri pengolahan kelapa ternyata hanya mampu menurunkan masalah kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hilir rata-rata sebesar 1,21 persen. Oleh karena itu, investasi disektor kelapa dipandang belum mampu mengatasi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir bila investasinya hanya sebesar 50 milyar.

Untuk menekan tingkat kebocoran wilayah di sektor industri pengolahan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir perlu dilakukan upaya untuk meminimalisasi terjadinya aliran pendapatan modal dan pendapatan tenaga kerja yang keluar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar A. 2004. Organisasi Ekonomi: Konsep Pilihan Aktivitas Ekonomi melalui Kelembagaan Pasar atau Organisasi. Bahan Kuliah Program Studi Ilmu-Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Program Pascasarjana IPB, Bogor (Tidak dipublikasikan).
- Balitbang dan BPS Provinsi Riau. 2006. Profil Kemiskinan Provinsi Riau Tahun 2005. Balitbang dan BPS Provinsi Riau. Pekanbaru.

- Barrett, C. R. and J. G. McPeak. 2005. Poverty Traps and Safety Nets. In A. de Janvry and R. Kanbur (eds.) Poverty, Inequality and Development: Essays in honor of Erik
- Bendavid-Val, A. 1991. Regional and Local Economic Analysis for Practitioners Fourth Edition. Praeger. London
- BPS Kabupaten Indragiri Hilir. 2007. Indragiri Hilir dalam Angka Tahun 2007. Tembilahah
- Dasgupta, P. (1997) Nutritional status, the Capacity to Work and Poverty Traps. Journal of Econometrics. 77 (1):5-37.
- Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir. 2007. Statistik Perkebunan Kelapa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2006. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir. Tembilahan.
- Pyatt, G dan Roe. 1978. *Social Accounting for Development Planning with special Reference to Sri Langka*. Cambridge University Press.
- Rada C. and Taylor L. 2006. Developing and Transition Economies in the Latee 20<sup>th</sup> Century: Diverging Growth Rates, Economic Structures, and Sources of Demand; CCEPA Working Paper 2006-I, Schwartz Centre For Economic Policy Analysis The New School.
- Reis H and Rua A. 2006. An Input-Output Analysis : Linkages Vs leakages; Working Paper Banco de Portugal, November 2006, Economic Research Department Banco de Portugal.
- Rustiadi, E., S. Saefulhakim dan D. Panuju. 2005. Perencanaan dan Pembangunan Wilayah. Edisi September 2007. Program Studi PWD-IPB. Bogor.
- Smeru, 2008. Peta Kemiskinan Indonesia: Asal Mula dan Signifikansinya. SMERU No. 26: May-Aug/2008. [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id).
- Standing G, 2006. The need for income security, Part I. Published in the CPPD Monitor. [www.epri.org.za/GuyStandingFullpaper2](http://www.epri.org.za/GuyStandingFullpaper2).

Lampiran 1. Klasifikasi SNSE Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005

Faktor Produksi	Tenaga kerja		1	
	Modal		2	
Institusi	Rumah tangga	Pertanian	Buruh tani	3
			Petani memiliki lahan 0.00-1.00 Ha	4
			Petani memiliki lahan > 1.00 Ha	5
		Bukan pertanian	Rumah tangga desa golongan bawah	6
			Rumah tangga desa golongan atas	7
			Rumah tangga kota golongan bawah	8
	Institusi lainnya	Perusahaan	Rumah tangga kota golongan atas	9
			Pemerintah	10
	Sektor Produksi	42 sektor		12-53
	Neraca Eksogen	Kapital		54
Pajak tidak langsung minus subsidi		55		
<i>The rest of the world</i>		56		
J U M L A H				

Lampiran 2. Klasifikasi Sektor Produksi pada SNSE Kabupaten Inhil Tahun 2005

Sektor Produksi	Kode	Sektor Produksi	Kode
Padi	12	Barang tambang & galian	33
Jagung	13	Industri makanan	34
Ketela pohon	14	Industri pakaian jadi	35
Umbi-umbian	15	Industri alat-alat pertanian	36
Kacang-kacangan	16	Industri kayu	37
Kedele	17	Industri lainnya	38
Sayur-sayuran	18	Industri kelapa skala besar (swasta)	39
Buah-buahan	19	Industri kelapa skala rumah tangga	40
Bahan makanan lainnya	20	Listrik dan air bersih	41
Karet	21	Bangunan	42
Kelapa	22	Perdagangan	43
Kelapa sawit	23	Restoran & hotel	44
Kopi	24	Angkutan jalan raya	45
Hasil perkebunan lainnya	25	Angkutan laut	46
Ternak dan hasil-hasilnya	26	Penunjang angkutan	47
Unggas dan hasil-hasilnya	27	Kamunikasi	48
Kayu	28	Bank dan lembaga keuangan	49
Hasil hutan lainnya	29	Jasa perusahaan & sewa bangunan	50
Ikan laut dan hasilnya	30	Pemerintahan umum	51
Ikan darat dan hasilnya	31	Jasa sosial kemasyarakatan	52
Udang	32	Jasa perorangan & rumah tangga	53